

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di negara-negara maju yang memiliki praktik akuntansi yang kompleks kebutuhan terhadap publikasi informasi keuangan merupakan suatu keniscayaan. Bahkan tanpa harus dipaksa pun, institusi bisnis maupun publik secara suka rela bersedia menyajikan laporan keuangan dan mengungkapkan informasi penting yang terkait dengan organisasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*). Hingga saat ini masih ada masyarakat yang memiliki anggapan bahwa laporan keuangan hanya bermanfaat bagi mereka yang memiliki pengetahuan akuntansi dan keuangan saja, sebab merekalah yang dapat memahami dan menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan. Laporan keuangan disajikan kepada pemangku kepentingan bukan untuk mempersulit dan membingungkan pembacanya tetapi justru untuk membantu mereka dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas. (Mahmudi, 2019).

Tuntutan publik akan kinerja pemerintahan yang terus meningkat, kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus ditingkatkan untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Tujuan umum dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi tentang anggaran riil, posisi keuangan, arus masuk/keluar, dan kinerja keuangan entitas pelapor yang berguna bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Ketika laporan keuangan akhir memenuhi karakteristik kualitatif dari laporan keuangan yang relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, maka akan mencerminkan apakah kinerja pemerintah berfungsi dengan baik. (Triana, 2020).

Kondisi yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan, hasil keputusan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat. (Fatmawati, 2020).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah (baik pusat maupun daerah) adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan yang dihasilkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas segala kegiatan yang dilakukan terdiri dari 7 jenis laporan yaitu, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca,

Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang merupakan media yang digunakan oleh entitas pelaporan keuangan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangan kepada publik. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual. Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. (Safitri et al., 2023).

Dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas pada entitas pemerintah maka harus didasari pula dengan sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas. Kualitas aparatur pemerintah menjadi hal yang sangat krusial, sebab ditangan aparatur pemerintah inilah yang akan menghasilkan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah terhadap publik. Kemampuan sumber daya manusia yang kompeten terhadap pengelolaan keuangan tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kompetensi aparatur adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. (Kansah et al., 2023).

Demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, maka pemerintah mencoba mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan *good governance*. Salah satu bentuk upaya penerapan *good governance* dalam bidang pengelolaan keuangan daerah adalah melalui pemberlakuan kewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya aktivitas usaha. *Good Governance* dikenal dengan adanya lima prinsip utama yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. (Khairunnas, 2021).

Pemanfaatan teknologi informasi mungkin mempengaruhi kualitas pada pelaporan keuangan entitas akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Teknologi informasi sudah menjadi pilihan utama dalam menciptakan system informasi suatu organisasi yang tangguh dan mampu melahirkan keunggulan kompetitif ditengah persaingan yang semakin ketat.

Dengan kemajuan teknologi pada saat ini, instansi-instansi pemerintah sudah mulai meninggalkan sistem manual dan beralih ke sistem komputer. Namun kendala dalam penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada dan keterbatasan dana yang dimiliki. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor penggunaan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal karena masih sedikit situs web pemerintah yang update mengenai informasi keuangannya. Pemanfaatan teknologi informasi yang optimal tentunya akan sangat

membantu dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. (Zubaidi, 2019).

Laporan keuangan daerah memiliki manfaat penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Dengan adanya laporan keuangan yang berkualitas, pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang jelas dan dapat dipercaya kepada berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat, DPRD, auditor, dan pemerintah pusat. Laporan ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efisien dan efektif, sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan publik yang lebih baik. Selain itu, laporan keuangan daerah membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih rasional terkait alokasi sumber daya, mencegah potensi penyimpangan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemerintah Kabupaten Semarang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Jawa Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022. Pencapaian ini adalah yang ke-12 kali berturut-turut sejak tahun 2012. Kepala BPK Perwakilan Jateng, Hari Wiwoho menjelaskan pihaknya telah melakukan beberapa pengujian pada laporan keuangan Pemkab Semarang tahun anggaran 2022. Diantaranya pengujian pengendalian dan substantif atas transaksi dan saldo keuangan yang dilaksanakan. Pengujian itu untuk menilai kewajaran dan kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan dan kecukupan pengungkapan pelaksanaan. Semalin itu juga untuk mengetahui efektifitas implementasi keuangan.

Pencapaian opini WTP ini juga tidak lepas dari kerja sama dengan DPRD Kabupaten Semarang. Ketua DPRD Bondan Marutohening menghargai kerja keras jajaran eksekutif mengelola keuangan daerah yang berbuah opini WTP ini. Dia juga berterima kasih kepada jajaran BPK Perwakilan Jateng yang terus mendampingi Pemkab Semarang untuk mengelola keuangan daerah dengan baik.

Namun, dengan pencapaian tersebut Bupati juga mengingatkan untuk berhati-hati mengelola APBD, pengadaan barang dan jasa serta pelayanan publik untuk meningkatkan komitmen dan integritas para pejabat melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan profesional, bersih dan akuntabel. Selain itu juga untuk tidak melakukan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) serta menghindari sumbang terima suap atau gratifikasi.

Bupati Semarang juga mengingatkan para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk serius melakukan evaluasi keamanan sistem informasi berbasis elektronik. Sebab berbagai data yang ada dapat diretas dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung. Sehingga berakibat terhambatnya pelayanan informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zubaidi (2019), Kuntadi (2022), Rachmawati & Anik (2020), serta Sari (2022) dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah masih menunjukkan hasil yang bervariasi. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kualitas aparatur pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi secara umum ditemukan faktor tersebut berpengaruh positif terhadap laporan keuangan daerah. Namun hasil penelitian lain menunjukkan bahwa kualitas aparatur pemerintah dan *good governance* tidak selalu memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Perbedaan temuan ini mengindikasikan bahwa dampak dari setiap variabel

dapat dipengaruhi oleh kondisi spesifik di masing-masing daerah, termasuk kebijakan yang diterapkan serta efektifitas implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, kualitas laporan keuangan daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Namun masih terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah seperti penerapan SAP, kualitas aparatur pemerintah, *good governance*, dan pemanfaatan teknologi informasi. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sehingga masih diperlukan kajian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan SAP, kualitas aparatur pemerintah, *good governance*, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Semarang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Teori *Stakeholder*

Menurut Mardiasmo (2021), teori *stakeholder* dalam laporan keuangan daerah berfungsi untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan dapat memenuhi kebutuhan berbagai stakeholder dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah harus memperhatikan kepentingan semua pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan.

Teori *stakeholder* digunakan dalam penelitian ini karena teori ini dapat menjelaskan bagaimana pemerintah daerah bertanggungjawab dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Dengan adanya laporan keuangan daerah yang berkualitas, kepercayaan *stakeholder* terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat meningkat, sehingga dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintah yang lebih baik.

### 2.2 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2022) tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari suatu entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut (Nagara & Mulyani, 2019) Kualitas laporan keuangan daerah dapat diukur berdasarkan karakteristik kualitatif diantaranya :

#### 1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang terdapat di dalamnya dapat mempengaruhi pemakai dalam pengambilan keputusan dengan cara mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau yang akan datang. Informasi tersebut dikatakan relevan apabila :

1. Memiliki manfaat timbal balik (*feedback value*)
2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

2. Andal  
Laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila informasi yang ada di dalamnya bebas dari kesalahan yang bersifat material, menyajikan setiap fakta yang benar, serta dapat diverifikasi kebenarannya.
3. Dapat dibandingkan  
Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan dari entitas lain yang dapat digunakan sebagai alat dalam pengambilan keputusan.
4. Dapat dipahami  
Laporan keuangan yang telah dibuat harus dapat dipahami oleh pengguna secara umum, tidak hanya oleh pihak entitas saja melainkan masyarakat yang ingin mengetahuinya. Laporan keuangan dapat dipahami apabila pengguna mengerti dan memahami isi atau informasi yang ada pada laporan keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

### **2.3 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**

Menurut PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah adalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara yang disampaikan melalui laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Laporan keuangan pemerintah harus disampaikan secara tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, standar akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia adalah SAP berbasis akrual yang sebelumnya SAP berbasis kas dan SAP berbasis kas menuju akrual. Basis akrual merupakan konsep pengakuan akuntansi yang didasarkan pada saat terjadinya transaksi atau peristiwa ekonomi tanpa memperhatikan saat terjadinya aliran kas masuk atau keluar dari transaksi tersebut.

Tujuan utama penerapan SAP Berbasis Akrual pada pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang selanjutnya dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat laporan keuangan bagi para pemangku kepentingan entitas pemerintahan dalam menilai akuntabilitas dan transparansi serta membuat keputusan terhadap suatu entitas pemerintahan. Basis Akrual dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel dibandingkan dengan basis kas karena seluruh beban yang terjadi baik yang sudah dibayar ataupun belum dibayar telah dicatat dan diakui sehingga perhitungan biaya pelayanan public dapat terlihat lebih wajar (Jati, 2019).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan pemerintah terdiri atas :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah

serta merupakan gambaran perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang disajikan secara komparatif meliputi pos-pos :

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya
- e. Saldo Anggaran Lebih Akhir

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

5. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

6. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, pendanaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Catatan Atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **2.3.1 Prinsip dari Standar Akuntansi Pemerintahan**

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengemukakan 8 prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, yaitu :

1. Basis Akuntansi

Basis kas digunakan untuk pengukuran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang berarti pendapatan diakui saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Pemerintah atau oleh entitas pelapor, belanja diakui sebagai pengeluaran ketika kas

dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Pemerintah atau oleh entitas pelapor. Sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca yang berarti kas diakui saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan kas tersebut sudah diterima atau dibayar.

2. Nilai Historis  
Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi dengan mudah.
3. Realisasi  
Pendapatan tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah pada suatu periode akuntansi dapat digunakan untuk berbagai kepentingan.
4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal  
Informasi yang dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitas saja.
5. Periodisitas  
Kegiatan akuntansi dan pelaporan harus dibagi menjadi beberapa periode pelaporan agar kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan.
6. Konsistensi  
Konsistensi bisa berupa perlakuan akuntansi yang sama dan diterapkan pada kejadian serupa dari periode ke periode, tetapi tidak berarti tidak diperbolehkan terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain dengan syarat metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dari metode sebelumnya, kemudian perubahan metode tersebut harus diungkapkan dalam CaLK.
7. Pengungkapan Lengkap  
Segala informasi yang dibutuhkan oleh pengguna harus disajikan secara lengkap pada laporan keuangan dan informasi tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau CaLK.
8. Penyajian Wajar  
Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disajikan secara wajar dengan faktor pertimbangan yang sehat dalam menghadapi ketidakpastian peristiwa atau keadaan tertentu.

#### **2.4 Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah**

Aparatur Pemerintah merupakan alat kelengkapan di pemerintah terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegaiwaan yang mempunyai tanggungjawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari sebagai abdi Negara dan masyarakat, bertugas dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan pembangunan serta senantiasa mengabdikan dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan aparatur yang ada di dalamnya. Dalam organisasi sector

public, peran aparatur lebih ditekankan pada kemampuan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga organisasi tetap memiliki reputasi kinerja yang unggul dan akuntabel dimata masyarakat. (Subardjo, 2019)

Kualitas penyelenggaraan pelayanan public sangat ditentukan oleh kualitas aparatur penyelenggara pelayanan public. Penyelenggara pelayanan public berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan. Terdapat 5 karakteristik kompetensi yang harus dipenuhi penyelenggara pelayanan public, yaitu : (1) Motif, (2) Sifat, (3) Konsep Diri, (4) Pegetahuan, dan (5) Keterampilan.

Kualitas aparatur daerah adalah kemampuan seseorang atau individu dalam suatu organisasi atau suatu sistem untuk untuk melaksanakan fungsi-fungsi secara efektif dan efisien agar tujuan tercapai (Pravasanti & Ningsih, 2019). Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan public yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang public dibelanjakan, tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang public telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien (M. Sari, 2021).

### **2.5 Good Governance ( Tata Kelola yang Baik )**

Menurut *World Bank*, governance merupakan cara bagaimana pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat dan lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administrative.

*Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan tanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif yang dijalankan dengan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Hidayat, 2019).

*Good governance* diartikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha atau berkarya dan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu tata kelola yang baik untuk menatur hubungan, fungsi, dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik (Indriana dan Nasrun, 2019).

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi memiliki interaksi dan jaringan yang setara dan bersinergi dimana keduanya dapat berkembang bila ada kepercayaan, transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas. Dalam pelaksanaan *good governance* didasari pada 5 prinsip utama yaitu : (1) transparansi, (2) akuntabilitas, (3) responsibilitas, (4) independensi, dan (5) keadilan (Qothrunnada, 2021).

### **2.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Dalam mencapai suatu tujuan tertentu, dalam organisasi membutuhkan pengendalian intern yang didalamnya dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan teknologi informasi. Teknologi informasi dalam organisasi sektor publik diguynakan sebagai sarana pendukung dalam menyajikan laporan keuangan pemerintahan.

Beberapa manfaat dari teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi, dan menyiapn laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, dan masih banyak lagi. Namun, untuk implementasi hal tersebut memerlukan biaya yang tidak murah.

Kendala dari pemanfaatan teknologi informasi antara lain terkait dengan kondisi perangkat keras yang belum memadai, perangkat lunak yang digunakan, kondisi sumber daya manusia yang belum mampu mengaplikasikan teknologi, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang dapat menjadi faktor yang membuat pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal. Adanya ketidak optimalan ini bisa saja mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. Hal ini menandakan bahwa teknologi informasi dapat bermanfaat untuk mendorong kesuksesan dari tujuan organisasi pemerintah. Selain itu, dengan adanya teknologi informasi tentunya pekerjaan untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan akan lebih mudah dan cepat. (Ardianti, 2019)

## **2.7 Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya sangat penting sebagai dasar dalam penulisan penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penulisan penelitian ini sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan (Admaja & Wahyundaru, 2020) serta penelitian (Fatmawati, 2020) dengan teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda, menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rachmawati & Anik, 2020) dengan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa penerapan SAP dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Semarang. Sedangkan kualitas aparatur pemerintah daerah dan *good governance* memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Semarang.

Penelitian yang dilakukan oleh (Apriansyah, 2020) dengan teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda menunjukkan bahwa secara simultan penerapan SAP, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Bungo. Tetapi secara parsial, penerapan SAP dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Bungo. Sedangkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Bungo.

Penelitian yang dilakukan oleh (F. M. Sari, 2022) dengan teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan kualitas aparatur pemerintah daerah dan *good governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

## **2.8 Pengembangan Hipotesis**

Bedasarkan tinjauan pustaka dan kerangka konseptual, maka untuk pengembangan hipotesisnya adalah sebagai berikut :

### **2.8.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan landasan hukum bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan dana

maupun realisasinya secara transparan, bersih, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan guna menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel yang sesuai dengan standar aturan yang berlaku sehingga laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Jika Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diterapkan dengan baik, maka keuangan laporan daerah yang dihasilkan akan lebih akurat, dapat dibandingkan, dan relevan bagi pemangku kepentingan.

Penelitian Sari, (2022) mengungkapkan berdasarkan hasil penelitiannya membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

**H<sub>1</sub> : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

### **2.8.2 Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Untuk menilai kualitas aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawab serta hasil kinerjanya dapat dilihat dari latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan akuntansi berbasis akrual dan menerapkannya dalam pekerjaan yaitu menyusun laporan keuangan berbasis akrual serta dari kompetensi yang dimiliki dan tingkat tanggungjawab yang dimilikinya, karena semakin tinggi jabatan akan semakin besar pula tanggungjawab terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan yang berkualitas. Aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi tinggi akan lebih mampu menyusun laporan keuangan daerah yang akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Apriansyah., (2020) mengungkapkan bahwa kualitas aparatur pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

**H<sub>2</sub> : Kualitas Aparatur Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

### **2.8.3 Pengaruh *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, sehingga diharapkan kualitas pelayanan publik dan kualitas keuangan daerah akan semakin baik melalui tata kelola yang baik dan bersih tanpa adanya unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan implementasi dari penerapan tata kelola yang baik yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Jika tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik, maka proses penyusunan laporan keuangan daerah akan dapat memenuhi harapan *stakeholder*

Penelitian Indriana dan Nasrun, (2019) menunjukkan angka R Square atau adjusted R sebesar 0,450 yang berarti bahwa variabel dependen (laporan keuangan daerah) dapat dijelaskan oleh variabel independen (*good governance*) dimana apabila nilai adjust R<sup>2</sup> dalam jumlah presentase adalah sebesar 4,5%.

**H<sub>3</sub> : *Good Governance* berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

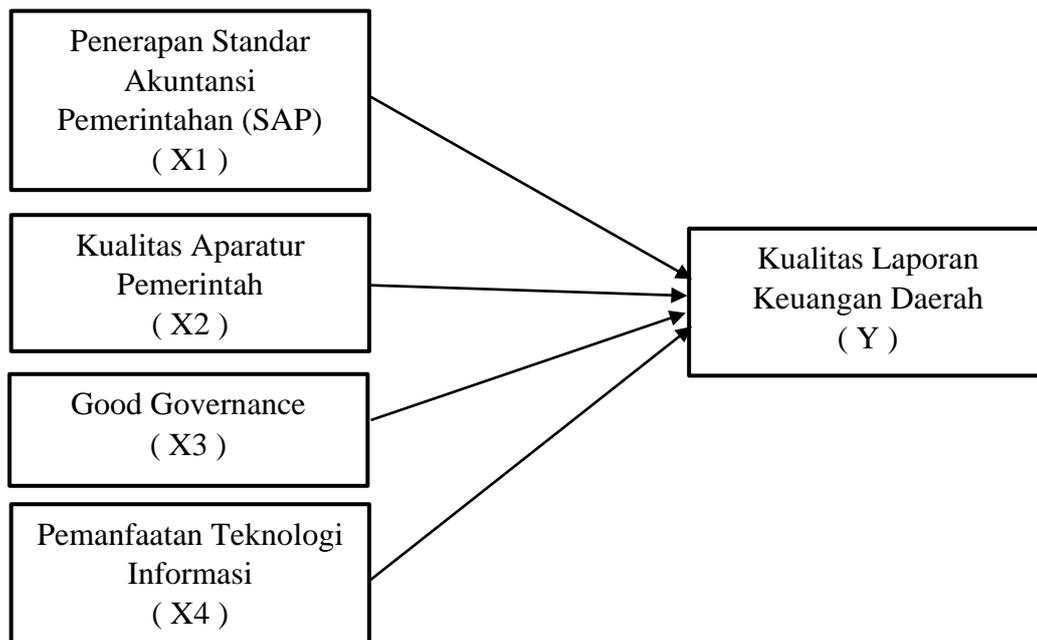
#### 2.8.4 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Dengan adanya teknologi informasi yang semakin maju di era sekarang dapat mewujudkan kecepatan proses pelaporan keuangan sehingga mampu menghasilkan output laporan keuangan yang relevan, andal, dan tepat waktu karena pemanfaatan teknologi dapat mempercepat proses pelaporan keuangan daripada menggunakan proses manual dan dalam publikasi dengan jaringan yang bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat umum. Para pemangku kepentingan membutuhkan informasi yang cepat dan akurat yang dapat difasilitasi oleh sistem informasi keuangan yang baik. Oleh karena itu, teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam penyusunan laporan keuangan daerah

Penelitian Yanto dan Nada (2023) mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintahan dapat meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Semakin baik pemanfaatannya, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

**H<sub>4</sub> : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

#### 2.9 Model Penelitian



### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Semarang yang meliputi dinas, badan, kantor, dan sekretaris daerah. Dengan alasan karena Kabupaten Semarang telah memperoleh predikat WTP dari BPK sebanyak 12 kali berturut-turut, maka peneliti tertarik untuk meneliti sebagian faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan kriteria tertentu dengan kriteria responden sebagai berikut :

- a. Para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan di masing-masing Satuan Kerja.
- b. Aparatur pemerintah yang menduduki jabatan seperti kepala bagian, kepala sub.bagian, dan staf-staf bagian keuangan.
- c. Memiliki masa kerja minimal 2 tahun dalam SKPD
- d. Mengetahui dan terlibat dalam penyusunan anggaran dan penyusunan laporan keuangan di SKPD

### Variabel Dan Pengukuran

No.	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
1	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relevan</li> <li>2. Andal</li> <li>3. Dapat dibandingkan</li> <li>4. Dapat dipahami</li> </ol> (Rachmawati & Anik, 2020)
2	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X <sub>1</sub> )	Prinsip-prinsip akuntansi diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.	PSAP meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyajian Laporan Keuangan</li> <li>2. Laporan Realisasi Anggaran</li> <li>3. Laporan Arus Kas</li> <li>4. Catatan Atas Laporan Keuangan</li> <li>5. Akuntansi Persediaan</li> <li>6. Akuntansi Investasi</li> <li>7. Akuntansi Aset Tetap</li> <li>8. Akuntansi Kontruksi dalam pengerjaan</li> <li>9. Akuntansi Kewajiban</li> <li>10. Koreksi Kesalahan</li> <li>11. Laporan Keuangan Konsolidasi</li> <li>12. Laporan Operasional</li> </ol> (Yulita, 2021)
3	Kualitas Aparatur Pemerintah (X <sub>2</sub> )	Kemampuan sumber daya manusia yang bekerja pada pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pendidikan, pelatihan yang diperoleh, pemahaman mengenai tugas dan tanggungjawab terhadap kewajiban.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan</li> <li>2. Pengetahuan</li> <li>3. Pengalaman</li> <li>4. Sikap</li> </ol> (Rachmawati & Anik, 2020)

4	Good Governance (X <sub>3</sub> )	Tata kelola pemerintahan yang baik meliputi penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akuntabilitas</li> <li>2. Transparansi</li> <li>3. Pertanggungjawaban</li> <li>4. Efektivitas</li> </ol> (Rachmawati & Anik, 2020)
5	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X <sub>4</sub> )	Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan perangkat komputer dan jaringan komputer tiap satuan kerja.</li> <li>2. Pemanfaatan jaringan internet sebagai penghubung dalam pertukaran data</li> <li>3. Penggunaan software untuk pengolahan data transaksi keuangan.</li> <li>4. Pemeliharaan teknologi informasi</li> </ol> (Admaja & Wahyundaru, 2020)

### 3.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model *Partial Least Square* (PLS) dan menggunakan dua model yaitu analisa *outer model* untuk mengevaluasi model pengukuran dan memastikan bahwa *measurement* layak untuk dijadikan pengukuran, dan analisa *inner model* atau model struktural yang menggambarkan hubungan antar variabel berdasarkan pada *substantive theory* (Ghozali dan Kusumadewi, 2020). Aplikasi pengolah data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SmartPLS 4.0.

#### 3.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menyimpulkan dan memberikan gambaran karakteristik suatu data. Analisis deskriptif menampilkan informasi seperti nilai rata-rata (mean), median, mode, frekuensi, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum dari setiap variabel dalam satu set data baik dalam bentuk tabel maupun grafik. (Ghozali dan Kusumadewi, 2020)

#### 3.2.2 Analisis Outer Model

Dalam pengukuran outer model terdapat 3 macam pengujian yang dilakukan yaitu :

##### 3.2.2.1 Uji *Convergent Validity*

Dalam penelitian ini, uji validitas konvergen digunakan untuk menguji ketepatan dan kecermatan data agar hasil penelitian tidak mengandung bias yang terbagi atas uji validitas konvergen dan uji diskriminan. Uji validitas konvergen dapat diketahui dengan melihat *outer loading* dengan kriteria yaitu nilai *loading factor* yang harus lebih dari 0,70 (Ghozali dan Kusumadewi, 2020).

### **3.2.2.2 Uji *Discriminant Validity***

Uji validitas diskriminan diukur dengan membandingkan nilai loading factor dari satu konstruk dengan nilai *loading factor* dari konstruk lain. Nilai *loading factor* yang ditargetkan harus lebih besar daripada nilai *loading factor* konstruk lain dan melihat nilai square root AVE yang disarankan yaitu lebih dari 0,5 (Ghozali dan Kusumadewi, 2020).

### **3.2.2.3 Uji *Composite Reliability***

Sebuah konstruk mempunyai data yang dapat diandalkan atau reliable jika memenuhi kriteria keandalan dari composite reliability  $> 0,70$ . Nilai composite reliability 0,60 sampai 0,70 masih dapat diterima untuk penelitian eksplorasi yang dapat diperkuat dengan nilai Cronbach's alpha. Nilai yang disarankan yaitu lebih dari 0,60 (Ghozali dan Kusumadewi, 2020).

## **3.2.3 Analisis Inner Model**

Dalam pengukuran inner model terdapat 2 macam pengujian yang dilakukan yaitu :

### **3.2.3.1 Uji Coefficient Determination (Adjusted R<sup>2</sup>)**

Uji Coefficient Determination (Adjusted R<sup>2</sup>) digunakan untuk menguji hubungan antar variabel, dimana nilai 0,70 mengindikasikan bahwa model tersebut kuat, nilai 0,45 berarti model tersebut sedang atau cukup, dan nilai 0,25 menunjukkan bahwa model tersebut lemah (Ghozali & Kusumadewi, 2020).

### **3.2.3.2 Uji Hipotesis**

Uji hipotesis dilakukan untuk menilai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara terpisah (Ghozali dan Kusumadewi, 2020). Uji hipotesis dapat dilihat melalui nilai p-value, pada tingkat keyakinan yang digunakan yaitu 95%, sehingga tingkat ketelitian atau batas ketidaktepatan adalah  $(\alpha) = 5\% = 0,05$ , jadi :

Jika p-value  $> \alpha$  (0,05), maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak

Jika p-value  $< \alpha$  (0,05), maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima